BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara modern perkembangan partai politik sangat signifikan. Berbagai macam partai politik tumbuh dan berkembang. Model antara satu partai dengan partai lainnya tentu saja beraneka ragam pula. Hal ini mendorong para ahli kepartaian mencoba melakukan pengelompokan-pengelompokan atau melakukan klasifikasi terhadap berbegai jenis partai politik dan kemudian menggolongkan dalam satu jenis atau satu golongan tersendiri. Mariam Budiarjo menyatakan klasifikasi partai dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.[1]

Pertama, Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam

[1] Miriam Budiardjo, 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 166-167

partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.[2]

Kedua, partai kader mementingkan kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia mulai bermunculan partai dengan ideologi agama terutama partai Islam. Islam melihat kebajikan tentang semua ukuran yang serupa dengan promosi kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang mengganggu kesatuan. Karena sebuah partai politik seperti itu hanya menghadirkan partisipasi sebahagian daripada masyarakat, maka partai politik cenderung kepada pemilahan masyarakat kedalam berbagai kelompok. Partai-partai Islamis telah banyak memperoleh perhatian intelektual selama dua dasawarsa terakhir. Partai Islam yang dimaksud disini adalah partai-partai yang secara eksplisit mengklaim Islam sebagai ideologi mereka dan/atau partai yang memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi atau kelompok Islam. Partai Islam yang secara tegas mencantumkan Islam sebagai azas partai ada tiga yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Hal yang menarik untuk kemudian diteliti ialah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik.

[2] *Ibid.,*

Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah satu diantara banyak partai baru yang memiliki ideologi agama (Islam) yang mampu mengembangkan sayapnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan Tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan Tarbiyah bisa dipahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam. Untuk memahami di mana letak PKS dalam peta gerakan Islam lain maka *setting* politik saat itu perlu dicermati. Di sini perlu diingat bahwa penguasa Orde Baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agama Islam.

Pada pemilu 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Karena kegagalan tersebut Partai Keadilan bermetamorfosis menjadi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Partai Keadilan Sejahtera. Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernya yang selalu dibimbing dengan cara tarbiyah.

Secara teoritis, rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai atau tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki parpol adalah fungsi rekrutmen politik.[3]

Rekrutmen politik merupakan seleksi, pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan di sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam rekrutmen politik, parpol umumnya memiliki cara sendiri dalam perekrutan calon anggota. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.[4] Kegiatan-kegiatan terorganisir secara sistematis oleh PKS dilakukan secara rutin, dengan harapan bahwa peserta-peserta baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Menurut Mujani dan Liddle mengenai partai-partai Islam dan demokrasi juga menunjukkan bahwa sejauh ini PKS melakukan "strategi dua jalur *(double-track strategy)*, dengan memperluas jejaring kader melalui rekrutmen baru di kampus-kampus sambil terus memperluas jangkauan pesannya melalui partisipasi politik di

[3] Taupik Azhari (2014): Skripsi: *Pola Kaderisasi Partai Golkar di Kota Pematang Siantar*. hlm 46
[4] Imadudin Rahmat (2012), *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, hlm, 278

tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Pengkaderan di kampus-kampus sangatlah penting karena selain berdakwah dikampus, juga mencari bakat-bakat mahasiswa yang memiliki kognitif yang baik untuk di rekrut kedalam partai nantinya.[5]

Tidak berbeda dengan pelaksanaan rekrutmen cabang PKS di kota lain, Kota Padang juga menerapkan hal yang sama, dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama yang ada di tingkat lokal. PKS Kota Padang menggunakan motif opera di Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), bentuk pendekatan orang per-orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon-calon kader yang akan direkrut tersebut akan diajak untuk berpartisipsi dalam serangkaian forum keagamaan dan pelatihan yang diorganisir oleh PKS seperti *usrah* (keluarga) atau *halaqah* (kelompok studi terbatas) atau *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (*camping*), *daurah* (pelatihan intelektual dan *workshop* Islami), *nadwah* (seminar) dan seterusnya. Harapannya adalah setiap peserta baru akan saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*), dan mendukung (*tafaul*).[6]

Yang kedua adalah pola rekrutmen instusional (*al-da'wah al-'amma*). Ada berbagai bentuk rekrutmen institusional yang bisa melibatkan struktur formal PKS maupun organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan PKS yang bekerjasama

[5]Burhanuddin Muhtadi, (2012) : *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 143
[6]Burhanuddin Muhtadi, *Ibid.*, hlm. 9

dengan institusi-institusi keagamaan seperti masjid maupun institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.[7]

Tujuan didirikannya PKS, sebagaimana tertuang dalam AD/ART[8], adalah "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". PKS menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan berates suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Karenanya pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, yang memisahkan agama dari negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa Muslim.

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hokum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Pengertian tersebut perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam Ukhuwah Islamiyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI.

Sejalan dengan mayoritas masyarakat Sumatera Barat adalah muslim yang sangat terikat dengan keislamannya, dimana dapat kita lihat dengan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah yang dipegang erat oleh masyarakat

[7] Burhanuddin Muhtadi, *Ibid.*, hlm. 144
[8] Lihat pada bab lampiran

Sumatera Barat. Di kota Padang sendiri nilai-nilai ini selalu diterapkan dalam hubungan bermasyarakat. Nilai nilai lokal ini sangat mempengaruhi dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera sendiri dengan mengutamakan nilai keislaman kadernya tidak lepas juga nilai nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi sangat jelas posisi PKS dalam wacana bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistic-objektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, NKRI Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara dijamin kebebasan pemeluknya untuk beriman secara tauhid, kepada Tuhan Yang Maha Esa.[9]

B. Rumusan Masalah

PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Meskipun hanya sekitar satu tahun setelah deklarasi (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti Pemilu tahun 1999. Dalam Pemilu 2004 sampai dengan tahun 2009, PKS mampu meningkatkan sejumlah suara yang cukup signifikan.

Dari tahun 1999 partai ini memperoleh suara 1,36 persen, Pemilu 2004 memperoleh suara 7,34 persen, Pemilu 2009 memperoleh suara 7,88 persen. Manajemen sistem perekrutan dilakukan dengan wadah yang disebut dengan *tarbiyah. Tarbiyah* ini merupakan salah satu metode dalam perekrutan kader. Partai

[9] Pkspadang.or.id, *Tentang PKS Kota Padang: Memperjuangkan Masyarakat Madani (https://pkspadang.or.id/tentang-partai-keadilan-sejahtera/),* diakses tanggal 27 Juni 2019

yang karena alasan *electoral threshold* berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.[10]

Keberhasilan PKS pada lingkup nasional juga tentu hasil kuatnya basis kader yang berhasil menduduki jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif diberbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Sumatera Barat kebehasilan PKS di tandai dengan kemenangan pemelihan kepala daerah, terutama di Kota Padang Di Kota Padang dengan mayoritas muslim menjadikan PKS sebagai partai islam yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Dengan perolehan suara walikota dan wakil walikota Padang pada tahun 2013 sebanyak 148.864 suara atau 50,29% dan di tahun 2018 212.526 suara atau 62,92%. (Lihat Tabel 1.1 dan 1.2)

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013

Kandidat	**Putatan ke-1**		**Putaraan ke-2**	
	Jumlah	**Persentase**	**Jumlah**	**Persentase**
Emma – Wahyu	25.599	8,17%		
Michel - Januardi	48.704	15,56%		
Desri - James	59.845	19,11%	147.166	49,71%
Asnawi - Surya	12,626	4,03%		
Ibrahim - Nardi	14.845	4,74%		
Kandris - Indra	13.762	4,39%		
Maigus - Armalis	36.465	11,60%		
Indra - Yefri	4.470	1,43%		
Syamsuar - Mawardi	4.616	1,47%		
Mahyeldi - Emzalmi	92.218	29,4%	148.864	50,29%
		100%		**100%**
Suara Sah	313.146	96,77%	296.030	98,60%
Suara tidak sah	10.448	3,23%	4.197	1,40%
		100%		**100%**

[10] Imadudun rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: Lkis, 2008), hlm. 1

Partisipasi pemilih	323.594	57,71%	300.227	53,6%
Pemilih terdaftar	560.723	**100%**	560.286	**100%**

Tabel 1.2
Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Mahyeldi – Hendri	212.526	62,92%
Emzalmi - Desri	125.238	37,08%
		100%
Suara sah	337.764	98,96%
Suara tidak sah	3.517	1,04%
		100%
Partisipasi pemilih	341.281	63,76%
Pemilih terdaftar	535.265	**100%**

Sumber: Data KPU Kota Padang

Selanjutnya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat dengan terpilihnya Irwan Prayitno selama dua periode dengan perolehan suara 657.763 suara atau 32,63% pada tahun 2010 dan 1.175.858 suara atau 58,62% pada tahun 2015 sangat memperlihatkan eksistensi PKS sebagai partai Islam yang baru dalam kancah partai politik. (Lihat Tabel 1.3 dan 1.4)

Tabel 1.3
Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010

Kandidat	Partai	Suara	Persentase
Ediwarman – Husni Hadi	Koalisi Partai Maju Bersama	91.726	4,55%
Marlis Rahman – Aristo Munandar	Partai Golkar & PDI-P	531.605	26,37%
Irwan Prayitno – Muslim Kasim	PKS, Hanura, PBR	**657.763**	**32,63%**
Endang Irzal – Asrul Syukur	Partai Demokrat	410.567	20,37%

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

	& Gerindra		
Fauzi Bahar – Yohannes Dahlan	PAN & PPP	324.123	16,08%
Tidak sah/Golput		84.055	
Total		**2.111.835**	**100%**
Pemilih Terdaftar		3.319.459	

Sumber: Data KPU Kota Padang

Tabel 1.4
Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015

Kandidat	Partai	Suara	Persentase
Muslim Kasim – Fauzi Bahar	PAN, PDI-P, Partai Nasdem, dan Hanura	830.131	41,38%
Irwan Prayitno – Nasrul Abit	PKS & Gerindra	**1.175.858**	**58,62%**
Tidah sah/Golput		1.466.013	
Total Suara Sah		**2.055.989**	**100%**
Pemilih Terdaftar		3.522.002	

Sumber: Data KPU Kota Padang

Terjadinya kenaikan dan peningkatan perolehan suara yang signifikan untuk jumlah kursi tersebut tidak terlepas dari kerja keras para caleg dan kandidat yang diusung, kader partai simpatisan dan dukungan masyarakat yang berpihak kepada PKS. Seperti yang disampaikan oleh Muhidi ;

> *"…Bagi PKS Kota Padang yang menjadi acuan keberhasilan dakwahnya dalam bidang politik, karena di Kota Padanglah, ada persebaran kader secara merata untuk ditingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dengan demikian bisa diukur secara akurat tingkat partisipasi dan kotribusi kader dalam memenangkan Pileg".*[11]

[11] Drs. Muhidi, MM (Ketua DPD PKS Kota Padang), Pks.id, *Terima Kasih Warga Kota Padang dan Kader-Kader PKS*, (http://www.pks.id/content/terima-kasih-warga-kota-padang-dan-kader-kader-pks) diakses tanggal 28 Juli 2018.

Pernyataan yang disampaikan oleh Muhidi menekankan bahwa keberhasilan PKS dalam mencapai perolehan suara yang cukup tinggi tidak terlepas dari peran kader PKS. Sembari demikian kader PKS direkrut berdasarkan sistem kaderisasi yang sudah terbangun dengan baik dengan sehingga PKS mendapatkan kader-kader terbaik. Kenyataan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Arnedi yarmen;

> "*…Bahwa kader PKS di Kota Padang direkrut melalui kalangan cendekiawan seperti dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai bersih, taat beragama dan merespon proses reformasi.*"[12]

Disamping itu PKS juga melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan berafiliasi melalui organisasi kemasyarakatan tertentu. Kegiatan pengenalan partai dimulai dengan pemberian pengajian-pengajian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kader PKS;

> *"…Sebagai partai dakwah, PKS mencirikan segala kegiatannya berbasis pengajian atau syiar Islam. PKS sangat berkepentingan merekrut sekaligus mengkader calon-calon pemimpin yang tangguh. PKS beranggapan bahwa berpolitik itu adalah bagian dari dakwah. Oleh sebab itu dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap PKS, kami sering melakukan pengajian-pengajian yang diselenggarakan bekerjasama dengan ormas-ormas, sekolah atau kampus-kampus. Tetapi pada tahap ini PKS tidak melibatkan politik secara kelembagaan, PKS mendekati para pihak yang "sepaham" dengan pola dakwah dan pengkaderan partai ini. Dengan cara yang demikian memberikan kemudahan bagi pendakwah PKS untuk memasuki institusi-institusi tersebut".*[13]

---

[12] Arnedi Yarmen, kutipan di dalam Jurnal; Nurman, S. dan Al Rafni, *Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004*, Jurnal Demokrasi, Vol. IV No. 2 Tahun 2005, hlm. 74

[13] Kutipan wawancara didalam Jurnal: Nurman, *Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan.* Jurnal Morland Civiv Education, Universitas Negeri Padang. hlm. 69

Dari penjelasan Muhidi di atas selaku Ketua DPD PKS Kota Padang periode 2010-2015, dapat diasumsikan bahwa sistem pengkaderanlah yang menjadi kekuatan PKS sebagai partai kader. Hal ini dapat dilihat dari pola rekrutmen kader-kader baru yang merupakan suatu bentuk pendekatan per-orang dengan komunikasi personal secara langsung. Seperti hal nya kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan untuk menumbuhkan semacam solidaritas baru berdasarkan kepercayaan dan komitmen yang sama. Kegiatan seperti ini tentunya nanti diharapkan akan terlaksana dengan baik untuk menjadikan kader-kader baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Selain itu beliau juga menegaskan bahwa PKS tidak melibatkan politik secara kelembagaan, ini berarti dengan memberi pelayanan sosial PKS sukses memberi gambaran yang berbeda dibanding partai-partai lain. Kegiatan pelayanan sosial yang mereka lakukan didukung sepenuhnya oleh hal-hal yang nyata dan bermanfaat. Sehingga nantinya dapat menjadikan nilai-nilai dan syari'ah Islam dalam negara sebagai jalan keluar untuk membuka diri dengan bekerja dalam sistem politik yang ada tanpa mengabaikan pluralitas bangsa. Dengan merealisasikan ajaran agama dan menghadiran nilai-nilai kemanusiaan yang luhur nantinya tentu PKS akan menjadi lembaga yang bisa mendapat dukungan publik secara luas.

Hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yang mana bertujuan untuk mengetahui sistem kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Padang. Dan juga untuk melihat program mereka dalam melakukan kaderisasi sehingga memiliki kader yang berkualitas, militan dan loyal. Sehingga memiliki jumlah kader yang tersebar ditingkat kelurahan dan kecamatan dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih terhadap Partai. Adapun fokus penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Rekrutmen dan Kaderisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang dalam meningkatkan jumlah suara dalam Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dari suatu penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Bila permasalahan mempertanyakan hal-hal yang belum diketahui, maka tujuan merinci apa saja yang ingin diketahui dan yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan rekrutmen dan kaderisasi DPD PKS Kota Padang dengan menggunakan Gerakan Tarbiyah, serta
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola rekrutmen dan kaderisasi DPD PKS Kota Padang dalam upaya meningkatkan suara dukungan di setiap Pemilu yang dilaksanakan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berguna bagi perkembangan suatu disiplin ilmu. Sedangkan manfaat

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

praktis merupakan manfaat yang bisa diambil dari sebuah penelitian dan diterapkan pada lokasi penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan kepada kalangan akademis serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam menambahkan pustaka ilmu pengetahuan khususnya pada pembendarahan Ilmu Politik Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai analisa pola rekrutmen dan kaderisasi DPD PKS Kota Padang dalam upaya meningkatkan suara dukungan dapa Pemilu.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA